



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

RENCANA STRATEGIS Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015 ^{*)}

^{*)} merupakan Revisi atas Renstra KPK 2010-2014 karena perubahan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pimpinan KPK masa bakti 2011-2015.

Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi KPK 2011-2015:

“Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien”.

dengan penjelasan:

- **Lembaga penggerak pemberantasan korupsi:** selain sebagai pelaku, KPK juga berperan sebagai pemicu dan pemberdayaan (*trigger*) lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.
- **Pemberantasan korupsi:** serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Berintegritas:** menjalankan organisasi secara kompeten, transparan, dan akuntabel, dengan tetap melakukan interaksi secara luas tanpa ada penyimpangan (*zero tolerance*).
- **Efektif:** semua elemen bangsa berperanserta dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemberantasan korupsi.
- **Efisien:** pemanfaatan sumber daya pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemberantasan korupsi secara optimal.

1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi KPK, **misi KPK** adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Fokus Area

Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map KPK 2011-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan Penguatan APGAKUM.

Pengertian *Grand Corruption* adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

- a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
- b. Melibatkan aparat penegak hukum;
- c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
- d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.

2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*), meliputi:

- a. Ketahanan pangan plus;
- b. Ketahanan energi dan lingkungan ;
- c. Penerimaan negara;
- d. Bidang infrastruktur.

3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).

4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.

5. Persiapan *Fraud Control*.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

3.1. Tujuan Strategis (*Ultimate Goal*)

Tujuan Utama (<i>Ultimate Goal</i>)	Indikator Keberhasilan
Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi	1. Indeks Penegakkan Hukum atau <i>Law Enforcement Index</i> (Survey, 1-10)
	2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10)

3.2. Sasaran Strategis (*Strategic Objectives*)

No	Fokus Area	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Keberhasilan
1	Penanganan Kasus <i>Grand Corruption</i> dan Penguatan APGAKUM	1. Keberhasilan Penanganan Kasus <i>Grand Corruption</i>	1. # Kasus (Pokok Kasus) <i>Grand Corruption</i>
		2. Efektivitas Penanganan Perkara Korupsi oleh APGAKUM	2. <i>Conviction Rate</i> Kasus yang Disupervisi
2	Perbaikan Sektor Strategis terkait Kepentingan Nasional	3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis	3. Indeks Kinerja Sektor Strategis (Survey)
3	Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).	4. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal	4. % Pelembagaan SIN
4	Penguatan Sistem Politik Berintegritas dan Masyarakat (CSO) Paham Integritas	5. Terbangunnya Integritas di Sektor Politik	5. Indeks Integritas Sektor Politik (Survey)
5	Persiapan <i>Fraud Control</i>	6. Terbangunnya Konsep <i>Fraud Control</i> sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi	6. % Pembangunan Konsep dan Disain <i>Fraud Control</i>
6	Pembangunan Kelembagaan KPK	7. Terwujudnya Integritas Organisasi KPK	7. Indeks Integritas KPK (Survey)

4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran KPK dalam melaksanakan tugas dengan fokus area periode 2011-2015 digambarkan dalam Peta Strategi (*Strategy Map*) sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi KPK (*Level 0 – Korporat*)

Peta Strategi KPK (*Level 0 – Korporat*) akan dijabarkan secara berjenjang (*cascading*) oleh Deputi/Sekjen (*Level 1*) dan Direktur/Karo (*Level 2*).

5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan KPK dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Untuk keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Renstra KPK ini, diperlukan komitmen Pimpinan dan dukungan seluruh pegawai KPK, serta konsistensi pada fokus area.
2. Guna menjaga independensi KPK, terhadap program dan kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, posisi KPK adalah bekerja sama untuk mensukseskan program dan kegiatan tersebut tetapi tidak termasuk pihak yang dievaluasi oleh pemerintah.
3. Kegiatan dan kerja sama dengan pihak eksternal agar mempertimbangkan integritas organisasi KPK tetap terjaga.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak eksternal lebih mengarah pada aspek strategis dan berdampak signifikan (*hasil/outcome, dampak/impact*) bagi organisasi maupun instansi yang di-*trigger* dan akan dievaluasi secara berkala oleh Pimpinan.
5. Program dan kegiatan KPK menggunakan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan.
6. Semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk eksternal KPK, diupayakan telah diimplementasikan di internal KPK (*KPK First*).
7. Deputi/Sekjen dan Direktorat/Biro menyesuaikan program kerja dan kegiatannya dengan mengacu kepada Renstra KPK Tahun 2011-2015.
 - a. Kegiatan yang telah direncanakan tahun 2012 namun belum sesuai dengan Renstra ini, agar disesuaikan (direvisi) pada kesempatan pertama, paling lambat dua pekan setelah Raker KPK.
 - b. Kegiatan tahun 2012 yang sudah sesuai dengan Renstra namun belum tersedia dananya, agar diusulkan penyediaan dananya, baik melalui realokasi maupun tambahan dana.
8. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2011 dan diluar fokus area namun masih memerlukan tindak lanjut, monitoring tindak lanjutnya agar dikoordinasikan dengan instansi terkait (BPKP, Itjen, Kemen PAN dan RB, dll).
9. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam fokus area dikoordinasikan oleh Deputi/Sekjen dan dilaksanakan oleh direktorat/biro dan/atau Tim Satgas/Pokja lintas unit yang dibentuk khusus untuk itu.

6. Indikator Keberhasilan (*Impact, Outcomes*) dan Target

6.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) :

No	Fokus Area	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Keberhasilan	Target per Tahun			
				2012	2013	2014	2015
1	Pemberantasan Korupsi	1. Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi	1. Indeks Penegakkan Hukum atau <i>Law Enforcement Index</i> (Survey, 1-10) **	-	PM	PM	PM
			2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10) ***	8,0	8,5	9,0	9,0
2	Penanganan <i>Grand Corruption</i> dan Penguatan APGAKUM	1. Keberhasilan Penanganan <i>Grand Corruption</i>	1. # Kasus (Pokok Kasus) <i>Grand Corruption</i>	3	3	4	4
		2. Efektivitas Penanganan Perkara Korupsi oleh APGAKUM	2. % <i>Conviction Rate</i> Kasus yang Disupervisi	30%	40%	60%	70%
3	Perbaikan Sektor Strategis terkait Kepentingan Nasional	1. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)	1. Indeks Kinerja Sektor Strategis (Survey, 1-5)	2,0	2,5	3,0	3,5
4	Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN)	1. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal	1. % Pelembagaan SIN	25%	50%	75%	100%
5	Penguatan Sistem Politik Berintegritas dan Masyarakat (CSO) Paham Integritas	1. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas	1. Survey Pemahaman Masyarakat thd Integritas dalam Pemilu (Survey, 1-5)	1,0	3,0	4,0	4,0
6	Persiapan <i>Fraud Control</i>	1. Terbangunnya <i>Fraud Control</i> sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi	1. % Pembangunan Konsep dan Disain <i>Fraud Control</i>	25%	50%	75%	100%
7	Pembangunan Kelembagaan KPK	1. Terwujudnya Integritas Organisasi KPK	1. Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)	4,0	4,0	4,0	4,0

** Indeks Penegakkan Hukum atau *Law Enforcement Index* akan diformulasikan metodologi dan *tools*-nya pada tahun 2012, bekerja sama dengan *stakeholders* antara lain UKP4, Kemitraan (*Partnership*), dan lain-lain, dan akan diimplementasikan mulai tahun 2013.

*** Diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) Sasaran Strategis KPK pada Perspektif *Stakeholder*.

6.2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process*) :

No	Deputi/ Setjen	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Keberhasilan	Target per Tahun			
				2012	2013	2014	2015
1	Deputi Penindakan	1. Penindakan Terintegrasi	1. <i>Conviction Rate</i> Perkara yang Ditangani KPK	90%	90%	90%	90%
			2. % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya	80%	80%	100%	100%
2	Deputi Pencegahan	1. Pencegahan Terintegrasi	1. % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis	30%	60%	80%	100%
			2. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN	10	10	10	10
			3. % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas	80%	80%	80%	80%
3	Deputi INDA	1. Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	1. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	25%	50%	75%	100%
			2. % Pembangunan Infrastruktur <i>Fraud Control</i>	25%	50%	75%	100%
4	Deputi PIPM	1. Pembangunan Kasus <i>Grand Corruption</i>	1. # Kasus (Pokok Kasus) <i>Grand Corruption</i> Siap LIDIK	6	6	8	8

6.3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*) :

No	Deputi/ Setjen	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Keberhasilan	Target per Tahun			
				2012	2013	2014	2015
1	Deputi PIPM	1. Integritas Kelembagaan KPK	1. # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku	0	0	0	0
2	Setjen		2. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi	100%	-	-	-
3	Setjen	1. Peningkatan Kapasitas SDM sesuai Fokus Area	1. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area	25%	50%	75%	100%
4	Setjen	1. Pengangkatan Penyidik KPK	1. # Penyidik KPK yang Diangkat	30	30	30	30
5	Setjen	1. Gedung KPK	1. % Ketersediaan Gedung KPK	-	-	50%	100%
6	INDA	1. Dukungan Infrastruktur TI	1. Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)	75	75	78	78

6.4. Perspektif Keuangan (*Financial*) :

No	Deputi/ Setjen	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objectives</i>)	Indikator Keberhasilan	Target per Tahun			
				2012	2013	2014	2015
1	Setjen	1. Ketersediaan Anggaran	1. % Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK	100%	100%	100%	100%

7. Initiatives Strategic (Program dan Kegiatan)

7.1. Perspektif Proses Internal (Internal Process) :

No	Unit	Sasaran Strategis	Indikator Keberhasilan	Inisiatif Strategis	Keterangan
1	Deputi Penindakan	Penindakan Terintegrasi	<i>Conviction Rate</i> Perkara yang Ditangani KPK	Peningkatan Kapasitas KPK dalam Penanganan <i>Grand Corruption</i>	Melibatkan eksternal KPK (CSO): Perguruan Tinggi, Pusat Studi Anti Korupsi, LSM, dll.
				Eksaminasi terhadap Penanganan Perkara oleh KPK	
			% Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya	Peningkatan Kapasitas APGAKUM	
2	Deputi Pencegahan	Pencegahan Terintegrasi	% Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis	Kajian yang integral, melibatkan mitra strategis, dan efisiensi birokrasi	
			# Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN	Konvensi Nasional	
				Survey dan <i>Mapping</i>	
				<i>Piloting</i> Sistem Integritas (SI) di K/L, CSO, dan Swasta	Paket Pencegahan untuk SI meliputi: a. Motor Penggerak Integritas (MPI) b. Kode Etik dan Pedoman Prilaku c. Revitalisasi Pelaporan dan Pemeriksaan Harta Kekayaan d. Revitalisasi Pelaporan dan Penetapan Gratifikasi (PPG) e. <i>Wistle Blower System</i>
				<i>Piloting</i> dan Penyempurnaan SIN	
			Pelembagaan SIN secara Formal		
			% Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas	Program Perilaku Politik Berintegritas (POPULER) pada Parpol	Pemberdayaan Bagian Kaderisasi Parpol tentang Integritas melalui TOT Berjenjang
	Motor Penggerak Integritas pada KPU dan Bawaslu	Pemberdayaan Mitra Kerja KPU dan Bawaslu melalui TOT Berjenjang			
	<i>Integrity Checking Card</i>	Pemberdayaan Jaringan Kerja Pemb. Integritas			
3	Deputi INDA	Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	% Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	Pengumpulan, Pengolahan, & Pemanfaatan Informasi dan Data Pemberantasan Korupsi	Pemberdayaan Mitra Kerja Nasional dan Internasional
				Pembangunan Sistem Komunikasi Terhubung (<i>Secure Online Communication</i>) dengan Mitra Kerja	Penguatan dan Pemberdayaan Mitra Kerja

			% Pembangunan Konsep dan Disain <i>Fraud Control</i>	Penyusunan Konsep dan Disain <i>Fraud Control</i>	
4	Deputi PIPM	Pembangunan Kasus <i>Grand Corruption</i>	# Kasus <i>Grand Corruption</i> Siap LIDIK	Proaktif Investigasi secara Terfokus pada Potensi <i>Grand Corruption</i>	
				Peningkatan Kapasitas dalam Menangani Kasus <i>Grand Corruption</i>	
				Pemberdayaan Peranserta Masyarakat	

7.2. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*) :

No	Unit	Sasaran Strategis	Indikator Keberhasilan	Inisiatif Strategis	Keterangan
1	Deputi PIPM	Integritas KPK	# Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku	Mengimplementasikan Paket Pencegahan Sistem Integritas di Internal KPK	KPK <i>First</i>
				Penegakkan Integritas di Internal KPK	
2	Setjen		% Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi	Revitalisasi Komponen Reformasi Birokrasi dan Penerapannya Secara Efektif	
3	Setjen	Peningkatan Kapasitas SDM sesuai Fokus Area	% Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area	Pemenuhan SDM sesuai Fokus Area	Pelatihan Berbasis TNA yang Holistik (Analisis Berbasis Kebutuhan Organisasi, <i>Gap Competency</i> , dan Kinerja)
				Peningkatan Kapasitas SDM (Existing) sesuai Fokus Area	
4	Setjen	Pengangkatan Penyidik KPK	# Penyidik KPK yang Diangkat	Pemenuhan Penyidik KPK	Bekerja sama dengan Instansi terkait (Diklat APGAKUM, JCLEC, dll)
5	Setjen	Gedung KPK	% Ketersediaan Gedung KPK	Persiapan Disain dan Rencana Proyek <i>Smart Building KPK</i>	
6	INDA	Dukungan Infrastruktur TI	Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)	Tersedianya Teknologi Informasi Pemberantasan Korupsi yang Terdepan	

7.3. Perspektif Keuangan (*Financial*) :

No	Unit	Sasaran Strategis	Indikator Keberhasilan	Inisiatif Strategis	Keterangan
1	Setjen	Ketersediaan Anggaran	% Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	

8. Anggaran

Anggaran yang telah dialokasikan untuk KPK dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut (dalam Jutaan Rupiah):

No.	Nama Program	Tahun Anggaran					
		2011	2012	2013	2014	2015*)	Total
1	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	172.534,71	220.647,85	169.169,16	178.332,39	213.029,78	953.713,89
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	404.054,55	442.383,02	426.769,89	507.667,79	507.667,79	2.288.543,04
3	Total KPK (1+2)	576.589,26	663.030,87	595.939,05	686.000,18	720.697,57	3.242.256,93

*) Angka proyeksi.

Dengan adanya Revisi Renstra KPK 2011-2015, maka akan diusulkan kepada Kemenkeu/Bappenas revisi terhadap:

- Rencana (Target) Kinerja KPK Tahun 2011-2015 (Lampiran 1).
- Rencana Pendanaan KPK Tahun 2011-2015 (Lampiran 2).

---oooOooo---